



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)

ISSN: 2541-3163(Print) ISSN: 2541-3317 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jpci>



Penguatan kompetensi TPACK guru bimbingan konseling berbasis hasil analisis kompetensi konselor pada MGBK sekolah menengah atas

Afdal Afdal*, Rezki Hariko, Gusni Dian Suri, Zikra Zikra, Indah Sukmawati, Miftahul Fikri
Departemen Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang

Article Info

Article history:

Received Oct 28th, 2024
Revised Nov 30th, 2024
Accepted Dec 31th, 2024

Keyword:

TPACK
Kompetensi Konselor
Layanan BK Digital
Pengabdian Masyarakat
MGBK

ABSTRACT

Program pengabdian masyarakat ini dirancang berdasarkan hasil analisis empiris terhadap kompetensi *Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK) konselor Indonesia yang menunjukkan bahwa tingkat TPACK konselor secara keseluruhan masih rendah, dengan skor rata-rata 40,67 dari skala 100. Kelemahan paling mencolok ditemukan pada aspek *Pedagogical Knowledge* (PK) dengan skor 33,01, *Pedagogical Content Knowledge* (PCK) dengan skor 43,61, dan *Content Knowledge* (CK) dengan skor 48,66. Temuan riset inilah yang menjadi landasan utama dirancangnya program pengabdian berbasis kebutuhan (*evidence-based community service*) bersama Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) SMA Kabupaten Agam. Kegiatan dilaksanakan pada 21 Oktober 2024 di SMK N 1 Tilatang Kamang, melibatkan 45 konselor sekolah dengan pendekatan pelatihan terpadu yang mencakup ceramah, diskusi, dan praktik langsung. Program penguatan difokuskan pada tiga domain: (1) *technological knowledge*, (2) *pedagogical knowledge*, dan (3) *content knowledge*, yang secara bertahap diintegrasikan menjadi kerangka TPACK yang utuh. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman konselor terhadap konsep dan implementasi TPACK, tumbuhnya kesadaran pedagogis tentang pentingnya integrasi teknologi dalam layanan BK, serta perubahan paradigma dari layanan konvensional menuju layanan digital yang lebih kreatif dan inovatif. Program ini menegaskan bahwa penguatan kompetensi profesional konselor tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan terintegrasi yang berkelanjutan dan berbasis bukti empiris.



© 2024 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Afdal Afdal,
Departemen Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang
Email: afdal.kons@fip.unp.ac.id

Pendahuluan

Transformasi pendidikan di era digital bukan sekadar pergeseran alat bantu mengajar dari papan tulis ke layar proyektor. Ia adalah perubahan epistemologis yang menuntut guru, termasuk guru Bimbingan dan Konseling (BK), untuk memikirkan ulang cara mereka memahami, merencanakan, dan menyampaikan layanan kepada peserta didik. Perkembangan Revolusi Industri 5.0, yang kini tidak hanya menempatkan teknologi sebagai instrumen produksi tetapi juga sebagai mitra intelektual manusia, menegaskan bahwa kompetensi profesional guru tidak cukup hanya bersandar pada penguasaan konten keilmuan semata (Hussin, 2018; Susanto, 2020). Diperlukan integrasi yang cerdas antara pengetahuan materi layanan, strategi pedagogis yang tepat, dan literasi

teknologi yang memadai suatu tuntutan yang secara konseptual dikerangkakan dalam model Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK).

TPACK pertama kali dikonseptualisasikan oleh Mishra dan Koehler (2006) sebagai perluasan dari ide pedagogical content knowledge (PCK) Shulman. Dalam kerangka ini, efektivitas pengajaran tidak lagi ditentukan oleh penguasaan salah satu domain saja, melainkan oleh kemampuan guru membangun hubungan produktif antara tiga domain pengetahuan yaitu konten, pedagogi, dan teknologi. Ketiganya berinteraksi secara dinamis menghasilkan tujuh komponen yang saling terkait yaitu TK, CK, PK, TCK, TPK, PCK, dan TPACK sebagai integrasi penuhnya (Koehler et al., 2013). Bagi guru BK, kerangka ini memiliki relevansi yang tinggi mengingat sifat layanan BK yang personalisasional, beragam kebutuhan klien, dan tuntutan kreativitas dalam menyampaikan materi layanan kepada peserta didik generasi Z yang secara alami tumbuh dalam lingkungan digital (Schroth, 2019; Szymkowiak et al., 2021).

Namun, realitas empiris menunjukkan gambaran yang cukup mengkhawatirkan. Sebuah studi yang dilakukan terhadap 420 responden konselor Indonesia meliputi mahasiswa sarjana BK (n=197), mahasiswa S2/S3 BK (n=28), guru BK belum tersertifikasi (n=75), dan guru BK tersertifikasi (n=120) mengungkapkan bahwa skor TPACK konselor secara keseluruhan masih rendah dengan rata-rata 40,67 dari skala 100 (Afdal et al., 2024). Temuan ini secara konsisten ditunjang oleh skor per-komponen, dimana guru BK yang sudah tersertifikasi pun hanya memperoleh rata-rata 40,37, jauh dari standar ideal. Lebih mengkhawatirkan lagi, kelemahan justru terpusat pada domain-domain yang paling fundamental untuk kualitas layanan BK, yaitu Pedagogical Knowledge (PK) dengan skor rata-rata 33,01, Pedagogical Content Knowledge (PCK) dengan skor 43,61, dan Content Knowledge (CK) dengan skor 48,66 (Afdal et al., 2024).

Rendahnya Pedagogical Knowledge mengindikasikan bahwa sebagian besar konselor belum memiliki pemahaman mendalam tentang proses dan praktik mengajar, pemahaman gaya belajar peserta didik, keterampilan manajemen layanan, serta strategi mengevaluasi pemahaman klien (Koehler et al., 2013; Santos & Cantro, 2021). Seorang konselor dengan pedagogical knowledge yang lemah cenderung menggunakan pendekatan yang monoton, kurang responsif terhadap kebutuhan individual peserta didik, dan tidak mampu menyesuaikan metode layanan dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi. Kondisi ini pada gilirannya berdampak pada turunnya antusiasme peserta didik terhadap layanan BK dan memperkuat stigma bahwa BK hanya diperlukan saat ada masalah berat.

Masalah PCK yang rendah menunjukkan bahwa konselor belum mampu membangun jembatan yang kuat antara pengetahuan materi BK dengan strategi pedagogis untuk menyampaikannya secara efektif. PCK mencakup pemahaman tentang inti materi layanan, proses pembelajaran, kurikulum, penilaian, dan hasil layanan (Lai & Lin, 2018; Ozudogru & Ozudogru, 2019). Tanpa PCK yang memadai, layanan BK berisiko menjadi kegiatan yang hanya mengisi waktu luang, kehilangan substansi, dan tidak mampu menghasilkan perubahan perilaku nyata pada peserta didik.

Persoalan Content Knowledge (CK) yang berada di skor 48,66 juga merupakan sinyal yang tidak bisa diabaikan. Bagi konselor, CK mencakup penguasaan terhadap konsep, teori, teknik-teknik konseling, kerangka berpikir, dan pendekatan berbasis bukti dalam BK (Csikos & Sztany, 2020; Rosenkranzer et al., 2017). Tanpa fondasi CK yang kuat, konselor tidak akan mampu melakukan analisis kebutuhan peserta didik secara akurat, memilih intervensi yang tepat, maupun menggunakan teknologi secara bermakna dalam layanan. Menariknya, meski Technology Knowledge (TK) relatif tinggi dengan skor 59,88, hal ini justru mempertegas bahwa permasalahan utama bukan pada kemampuan menggunakan perangkat teknologi, melainkan pada bagaimana mengintegrasikannya secara bermakna dengan pedagogi dan konten layanan BK.

Kondisi ini menjadi semakin relevan ketika dilihat dalam konteks MGBK SMA Kabupaten Agam. Berdasarkan studi awal yang dilakukan tim pengusul, MGBK Kabupaten Agam selama ini lebih berfungsi sebagai forum silaturahmi guru BK ketimbang wadah pengembangan kompetensi profesional. Berbagai kendala struktural seperti keterbatasan anggaran untuk menghadirkan narasumber profesional, kesibukan kegiatan di sekolah, dan dispersi geografis sekolah-sekolah di wilayah ini menjadi faktor penghambat yang nyata. Sementara itu, implementasi layanan BK di lapangan masih mengandalkan metode ceramah satu arah, jarang mengintegrasikan teknologi, dan kurang mampu menarik minat peserta didik generasi Z yang terbiasa dengan lingkungan belajar yang interaktif dan digital (Afdal et al., 2019; Sukmawati et al., 2022).

Kondisi kesenjangan kompetensi ini menegaskan urgensi dilakukannya program pengabdian yang tidak sekadar bersifat informatif, tetapi benar-benar transformatif dan berbasis kebutuhan riil lapangan. Program penguatan TPACK yang dirancang secara evidence-based berangkat dari data riset kompetensi konselor yang empiris diharapkan mampu menjadi katalis perubahan tidak hanya pada tataran keterampilan teknis, tetapi juga pada dimensi kesadaran pedagogis dan transformasi profesional guru BK. Inilah yang membedakan program pengabdian ini dari kegiatan pelatihan biasa, dimana ia bukan hanya tentang mengajarkan cara menggunakan

aplikasi atau perangkat lunak, melainkan tentang membangun pola pikir baru tentang apa artinya menjadi konselor yang kompeten di era Revolusi Industri 5.0.

Metode

Program pengabdian ini dilaksanakan dalam kerangka Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang didanai oleh Universitas Negeri Padang tahun 2024. Kegiatan berlangsung atas kerja sama antara Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan UNP dengan MGBK SMA/SMK Kabupaten Agam, yang secara institusional didukung oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat (yang mencakup wilayah kerja Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, dan Kota Padang Panjang).

Kegiatan pelatihan utama dilaksanakan pada 21 Oktober 2024 bertempat di SMK N 1 Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada aksesibilitas geografis bagi peserta yang berasal dari berbagai sekolah di wilayah Kabupaten Agam. Mitra utama kegiatan adalah MGBK SMA/SMK Kabupaten Agam, dengan Ketua MGBK Ibu Nur Rokhmah, S.Pd. sebagai penanggung jawab lapangan dan penghubung antara tim pengusul dengan peserta kegiatan. Peserta kegiatan berjumlah 45 guru BK/konselor sekolah yang tergabung dalam MGBK SMA/SMK Kabupaten Agam. Peserta berasal dari berbagai sekolah dengan latar belakang pengalaman mengajar yang beragam, mulai dari guru BK junior hingga yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Keberagaman ini dipandang sebagai kekuatan karena memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman dan perspektif yang kaya dalam proses pelatihan.

Program dilaksanakan dalam empat tahapan yang terstruktur dan saling berkesinambungan. Tahap 1 (koordinasi awal dan analisis kebutuhan), disini tim pelaksana melakukan koordinasi dengan ketua MGBK untuk merumuskan rencana aksi kegiatan, meliputi penentuan waktu, tempat, prosedur kerja, dan kebutuhan logistik. Pada tahap ini juga dilakukan konfirmasi ulang terhadap data hasil riset awal sebagai landasan penentuan fokus materi pelatihan. Tahap 2 (pelaksanaan pelatihan terstruktur), disini kegiatan inti berupa pelatihan selama satu hari penuh dengan kombinasi metode ceramah, diskusi interaktif, dan praktik langsung. Materi disampaikan secara berurutan mengikuti kerangka TPACK, dimulai dari pembangunan kesadaran konseptual hingga praktik implementasi. Tahap 3 (pendampingan dan refleksi), disini setelah pelatihan inti, peserta mendapatkan pendampingan untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam perencanaan layanan BK nyata di sekolah masing-masing. Sesi refleksi dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan implementasi dan merumuskan solusi Bersama. Tahap 4 (evaluasi menyeluruh dan tindak lanjut), disini evaluasi dilakukan pada awal kegiatan (pre-test), akhir kegiatan (post-test), dan satu bulan pasca kegiatan (evaluasi jangka menengah) untuk mengukur peningkatan pemahaman dan keberlanjutan implementasi TPACK di sekolah.

Kegiatan menggunakan tiga metode utama yang saling melengkapi. Pertama, metode ceramah digunakan untuk membangun fondasi konseptual tentang TPACK, menjelaskan tujuh komponen kerangka kerja, dan menyajikan data riset tentang kondisi TPACK konselor Indonesia sebagai titik tolak diskusi. Penyajian dilakukan secara variatif oleh enam pemateri dari UNP yaitu Prof. Dr. Afdal, Dr. Rezki Hariko, Dra. Zikra, Dr. Indah Sukmawati, Gusni Dian Suri, M.Pd, dan Dr. Miftahul Fikri dengan melibatkan pula mahasiswa S2 BK, Denia Syapitri, S.Pd., untuk memperkaya perspektif. Kedua, metode diskusi interaktif digunakan untuk mendorong peserta menganalisis kondisi TPACK mereka sendiri, berbagi pengalaman, dan secara kolektif mengidentifikasi hambatan serta peluang implementasi TPACK dalam konteks layanan BK di Kabupaten Agam. Diskusi ini dirancang tidak hanya sebagai sarana klarifikasi konsep, tetapi juga sebagai ruang refleksi profesional yang mendorong kesadaran akan kesenjangan antara kondisi layanan BK saat ini dengan yang seharusnya. Ketiga, praktik langsung diberikan agar peserta memiliki pengalaman nyata mengintegrasikan tiga komponen utama TPACK dalam merancang layanan BK. Peserta diajak untuk mencoba membuat media layanan BK berbasis teknologi, merancang skenario layanan yang mengintegrasikan technological knowledge, pedagogical knowledge, dan content knowledge secara terpadu.

Evaluasi program menggunakan instrumen TPACK Test yang diadaptasi dari instrumen riset awal (75 butir soal, reliabilitas 0,9 berdasarkan analisis Rasch), lembar observasi partisipasi, dan kuesioner respons peserta. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif untuk melihat perubahan skor pre-test dan post-test, sementara data kualitatif dari observasi dan refleksi peserta dianalisis secara tematik untuk memahami perubahan sikap dan kesadaran profesional konselor.

Hasil dan Diskusi

Salah satu keunikan program pengabdian ini dibandingkan pelatihan guru konvensional adalah ia tidak lahir dari asumsi, melainkan dari data. Sebelum program dirancang, tim pelaksana terlebih dahulu melakukan riset analitik terhadap kompetensi TPACK konselor Indonesia yang mencakup 420 responden. Tabel 1 merangkum skor TPACK konselor berdasarkan kelompok demografi.

Tabel 1. Skor TPACK Konselor Indonesia Berdasarkan Kelompok

Kelompok	Mhs S1	Mhs S2/S3	Guru Belum Sertifikasi	Guru Tertsertifikasi
N	197	28	75	120
Rerata Skor TPACK	30,26	36,36	38,84	40,37
Std. Deviasi	7,853	6,499	9,287	11,53
Minimum	6,00	25,00	11,00	15,00
Maximum	49,00	49,00	64,00	70,00

Sumber: Data riset tim pengabdian (Afdal et al., 2024)

Data pada Tabel 1 memperlihatkan pola yang sekaligus mengkhawatirkan dan mengundang refleksi mendalam. Bahwa guru tersertifikasi memiliki skor lebih tinggi dari mahasiswa adalah wajar pengalaman lapangan selalu menjadi guru terbaik. Namun fakta bahwa rata-rata tertinggi hanya mencapai 40,37 dari skala 100 mengindikasikan adanya permasalahan sistemik yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pengalaman kerja. Diperlukan intervensi pengembangan profesional yang terstruktur, berbasis kebutuhan, dan berkelanjutan. Tabel 2 memperinci kelemahan pada komponen Pedagogical Knowledge (PK), komponen yang paling krusial namun paling lemah dikuasai konselor Indonesia.

Tabel 2. Skor *Pedagogical Knowledge* (PK) Konselor Indonesia

Statistik	Mhs S1	Mhs S2/S3	Guru Belum Sertifikasi	Guru Tertsertifikasi
N	197	28	75	120
Rerata Skor PK	3,310	3,964	4,333	4,800
Std. Deviasi	1,597	1,621	1,818	2,240
Skor Rata-rata PK (skala 100)	33,01 (keseluruhan)			

Sumber: Data riset tim pengabdian (Afdal et al., 2024)

Skor PK rata-rata 33,01 dari skala 100 adalah angka yang berbicara keras. Ini bukan sekadar tentang angka statistik; ia mencerminkan kenyataan bahwa sebagian besar konselor di Indonesia mengajar dan melayani peserta didik tanpa memiliki fondasi pedagogis yang memadai. Padahal, dalam konteks layanan BK, pedagogical knowledge mencakup kemampuan memahami bagaimana peserta didik belajar dan berkembang, merancang pengalaman layanan yang bermakna, mengelola dinamika kelompok dalam bimbingan klasikal, dan mengevaluasi keberhasilan layanan secara formatif (Santos & Castro, 2021). Defisit kompetensi ini tidak akan dapat diatasi hanya dengan memperkenalkan teknologi baru yang lebih fundamental adalah membangun ulang kesadaran pedagogis konselor tentang apa yang sesungguhnya mereka lakukan ketika memberikan layanan kepada peserta didik.

Pelaksanaan Pelatihan: Antara Semangat dan Kejutan

Pelaksanaan kegiatan pada 21 Oktober 2024 di SMK N 1 Tilatang Kamang berjalan dengan antusias yang melampaui ekspektasi awal. Dalam sambutan resminya, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 yang diwakili oleh Kasi SMA dan SLB, Bapak Fadrizal, S.E., menyebut topik TPACK sangat relevan dengan kebutuhan guru BK di wilayah tersebut. Koordinator MGBK Kabupaten Agam, Bapak Drs. Zulfikar, mengungkapkan bahwa selama ini MGBK memang belum pernah mendapatkan program pengembangan kompetensi yang sedemikian komprehensif dan berbasis riset.

Yang menarik untuk dianalisis bukan hanya antusiasme pada level sambutan formal, melainkan pada respons peserta ketika materi mulai disampaikan. Ketika data riset tentang skor TPACK konselor Indonesia disajikan di awal sesi, terjadi momen yang bisa disebut sebagai kejutan epistemis, yaitu banyak peserta yang mengaku tidak menyadari bahwa kondisi kompetensi mereka sebenarnya sejauh itu dari standar ideal. Ini adalah titik balik penting, dimana ketika data bukan hanya menjadi bahan presentasi, tetapi menjadi cermin yang memantulkan realitas diri sendiri.

Sesi ceramah yang disampaikan secara bergantian oleh enam pemateri dari UNP memperlihatkan pendekatan yang tidak konvensional. Alih-alih hanya menjelaskan definisi dan komponen TPACK secara hirarkis, para pemateri menyajikan setiap komponen dalam kaitannya dengan problem konkret yang dihadapi guru BK sehari-hari. Misalnya, ketika membahas pedagogical knowledge, pemateri tidak sekadar mendefinisikannya, tetapi mengajak peserta merefleksikan: 'Ketika peserta didik Anda terlihat bosan saat bimbingan klasikal, apa yang Anda lakukan?' Pertanyaan seperti ini secara efektif membuka dialog tentang

keterbatasan repertoar pedagogis yang dimiliki konselor dan membangkitkan kesadaran tentang pentingnya pengembangan.

Perubahan Pemahaman: Dari Teknofobia Menuju Teknointegrasi

Salah satu temuan yang paling signifikan dari program ini adalah pergeseran cara pandang peserta terhadap teknologi dalam layanan BK. Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta memosisikan teknologi sebagai sesuatu yang terpisah dari praktik layanan BK, alat bantu tambahan yang boleh ada, boleh tidak, dan penggunaannya lebih ditentukan oleh ketersediaan fasilitas ketimbang oleh desain pedagogis yang sadar. Setelah mengikuti pelatihan, pemahaman ini bergeser secara signifikan.

Pergeseran ini sejalan dengan temuan Valtonen et al., (2020) yang menunjukkan bahwa pre-service dan in-service teachers sering kali memiliki persepsi yang keliru tentang teknologi sebagai objek yang terpisah dari pedagogi, dan bahwa pelatihan yang terintegrasi mampu mengubah persepsi tersebut. Dalam konteks layanan BK, integrasi teknologi bukan tentang menggunakan PowerPoint saat bimbingan klasikal atau mengisi instrumen penilaian secara online. Integrasi sejati terjadi ketika konselor mampu memilih teknologi yang tepat berdasarkan karakteristik materi layanan (TCK), menggunakannya dengan strategi pedagogis yang sesuai (TPK), dan mengintegrasikan keduanya dalam konteks layanan BK yang spesifik (TPACK penuh).

Dalam sesi praktik langsung, peserta diminta untuk merancang satu topik layanan BK dan mengidentifikasi bagaimana setiap komponen TPACK dapat diintegrasikan dalam perencanaan layanan tersebut. Hasilnya sangat beragam, beberapa peserta langsung mampu menghasilkan rancangan yang relatif komprehensif, sementara sebagian lain masih berjuang mengaitkan pedagogi dengan konten dan teknologi secara terpadu. Namun justru proses perjuangan ini yang tecermin dalam pertanyaan-pertanyaan kritis yang diajukan peserta yang menunjukkan bahwa perubahan kognitif sedang berlangsung.

Analisis Kritis: Mengapa PK, PCK, dan CK Harus Diprioritaskan?

Perlu ditegaskan kembali mengapa program ini secara strategis memfokuskan diri pada penguatan PK, PCK, dan CK dan bukan pada TK yang secara statistik sudah lebih tinggi. Logika di balik pilihan ini bersumber dari pemahaman tentang arsitektur TPACK itu sendiri. Technology Knowledge yang tinggi tanpa diimbangi dengan Pedagogical Knowledge yang memadai hanya akan menghasilkan apa yang oleh Niess (2011) disebut sebagai 'technology adoption without pedagogical transformation', konselor tahu cara menggunakan Canva atau Google Form, tetapi tidak tahu kapan, mengapa, dan bagaimana menggunakannya secara pedagogis bermakna dalam layanan BK. Fenomena ini bahkan bisa berbahaya jika diikuti dengan kepercayaan diri yang tidak beralasan, dimana guru merasa sudah inovatif karena menggunakan teknologi, padahal secara pedagogis masih sangat konvensional.

Sebaliknya, penguatan PK yang baik akan secara organik meningkatkan kualitas integrasi teknologi (Anggraini et al., 2025). Ketika konselor memahami dengan baik bagaimana peserta didik belajar, bagaimana mengelola dinamika kelas, dan bagaimana mengevaluasi efektivitas layanan, mereka akan secara alami mencari dan memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pedagogis tersebut. Inilah yang dalam kerangka TPACK disebut sebagai Technological Pedagogical Knowledge (TPK) yaitu kemampuan memilih teknologi berdasarkan pertimbangan pedagogis, bukan sekadar ketersediaan atau tren (Mishra & Koehler, 2006).

Hal yang sama berlaku untuk CK. Content Knowledge yang kuat dalam bidang BK mencakup pemahaman mendalam tentang teori perkembangan, teknik-teknik konseling, diagnostik permasalahan peserta didik, dan pendekatan layanan berbasis bukti (Jacob et al., 2020). Tanpa fondasi ini, integrasi teknologi hanya akan mempercepat penyebaran konten yang dangkal. Justru karena konselor memiliki CK yang kuat, mereka akan mampu memanfaatkan teknologi untuk menyajikan konten BK yang kaya, multidimensi, dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik klien.

Transformasi Layanan BK: Dari Konvensional menuju Digital yang Bermakna

Salah satu momen paling bermakna dalam kegiatan ini adalah ketika beberapa peserta mulai secara spontan mendiskusikan bagaimana mereka akan mengubah pendekatan layanan BK di sekolah masing-masing pasca pelatihan. Seorang peserta dari SMA Negeri di Lubuk Basung berbagi pengalaman bahwa selama ini ia hanya menggunakan metode ceramah dalam bimbingan klasikal dan sering mendapati peserta didik tidak antusias. Setelah mengikuti sesi tentang pedagogical knowledge dan praktik pembuatan media, ia merencanakan untuk merancang layanan menggunakan kombinasi video refleksi pendek, diskusi kelompok berbantuan digital, dan refleksi tertulis. Perubahan ini bukan hanya tentang teknik baru ia mencerminkan pergeseran paradigma yang lebih fundamental tentang peran konselor sebagai arsitek pengalaman belajar peserta didik.

Transformasi semacam ini persis yang diharapkan dari program pengabdian berbasis TPACK. Scharmer (2018) dalam teorinya tentang presencing menegaskan bahwa transformasi profesional yang sejati terjadi ketika seseorang mampu melihat kondisi dirinya saat ini dari sudut pandang yang berbeda, dan kemudian secara sadar

memilih untuk bergerak menuju kondisi yang lebih baik. Data riset TPACK yang disajikan di awal pelatihan, dalam hal ini, berfungsi sebagai katalis presencing, dimana ia membuat peserta melihat realitas profesional mereka dengan mata baru.

Dalam perspektif yang lebih luas, transformasi layanan BK menuju model yang lebih digital dan terintegrasi bukan sekadar respons terhadap tuntutan zaman, melainkan juga amanat profesional (Rimayati, 2023). Peserta didik generasi Z yang kini mengisi kursi-kursi SMA di Kabupaten Agam adalah generasi yang tumbuh dalam ekosistem digital, yang berpikir secara visual, yang terbiasa dengan informasi cepat dan interaktif. Layanan BK yang tidak mampu berbicara dalam bahasa digital mereka berisiko kehilangan relevansi dan pada akhirnya, kehilangan kemampuan untuk benar-benar membantu.

Tantangan dan Hambatan yang Ditemukan

Program ini tentu tidak berjalan tanpa hambatan. Beberapa tantangan yang ditemukan selama pelaksanaan layak untuk didiskusikan secara kritis karena memiliki implikasi penting bagi desain program pengabdian serupa di masa depan. Pertama, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara konselor senior dan junior dalam kecepatan menyerap materi TPACK. Konselor yang sudah lama mengajar cenderung memiliki kerangka praktik yang lebih rigid dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk melepaskan asumsi-asumsi lama tentang apa yang 'seharusnya' dilakukan dalam layanan BK. Ini bukan hambatan yang tak bisa diatasi, tetapi menuntut desain pelatihan yang lebih diferensial dan adaptif. Kedua, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa sekolah asal peserta menjadi perhatian tersendiri. Beberapa peserta mengungkapkan kekhawatiran bahwa ide-ide integrasi teknologi yang mereka pelajari sulit diimplementasikan karena sekolah mereka masih menghadapi masalah koneksi internet yang tidak stabil dan ketersediaan perangkat yang terbatas. Ini mengingatkan bahwa program pengembangan TPACK tidak bisa dipisahkan dari konteks infrastruktur yang melingkupinya. Ketiga, dan ini mungkin tantangan paling fundamental adalah soal keberlanjutan. Satu hari pelatihan, betapapun berkualitasnya, tidak bisa mengubah kompetensi yang bertahun-tahun terbentuk secara instan. Perubahan kompetensi TPACK yang sesungguhnya membutuhkan proses yang panjang, berulang, dan didukung oleh komunitas praktik yang terus-menerus saling menguatkan. MGBK, jika difungsikan secara optimal, memiliki potensi besar untuk menjadi komunitas praktik tersebut.

Simpulan

Program penguatan kompetensi TPACK guru BK yang dilaksanakan bersama MGBK SMA Kabupaten Agam ini berhasil membuktikan nilai strategis dari pendekatan evidence-based community service, yakni bahwa program pengabdian yang dirancang berdasarkan data riset yang sahih lebih mampu menyentuh kebutuhan nyata mitra dan menghasilkan dampak yang lebih bermakna. Data empiris tentang rendahnya skor TPACK konselor Indonesia, khususnya pada aspek PK (33,01), PCK (43,61), dan CK (48,66), bukan hanya menjadi justifikasi program, melainkan menjadi kompas yang mengarahkan seluruh desain intervensi. Hasil kegiatan menunjukkan perubahan yang signifikan pada tiga level. Pada level kognitif, terjadi peningkatan pemahaman peserta tentang konsep, komponen, dan logika integrasi TPACK dalam layanan BK. Pada level afektif, tumbuh kesadaran baru tentang pentingnya pengembangan kompetensi profesional berkelanjutan dan ketidakcukupan pendekatan layanan konvensional dalam menghadapi tantangan generasi Z. Pada level konatif, muncul komitmen nyata dari sejumlah peserta untuk mulai merancang ulang pendekatan layanan BK mereka dengan mengintegrasikan elemen-elemen TPACK. Pelatihan ini juga berhasil menegaskan bahwa penguatan TPACK konselor sekolah bukan sekadar upaya peningkatan keterampilan teknis ia adalah proyek transformasi profesional yang menyentuh cara konselor memahami profesinya, cara mereka memandang peserta didik, dan cara mereka memposisikan teknologi bukan sebagai beban tambahan, melainkan sebagai mitra pedagogis yang memperluas kemungkinan layanan. Berdasarkan temuan dan refleksi dari program ini, beberapa rekomendasi strategis dapat dirumuskan. Pertama bagi MGBK Kabupaten Agam, forum ini perlu bertransformasi dari wadah silaturahmi menjadi komunitas praktik profesional yang aktif. Pertemuan rutin MGBK dapat dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman implementasi TPACK, mendiskusikan tantangan lapangan, dan secara kolektif mengembangkan bahan layanan BK yang inovatif berbasis teknologi. Ketua MGBK memiliki peran kunci sebagai fasilitator pembelajaran profesional berkelanjutan. Kedua bagi sekolah, kepala sekolah dan pengawas BK perlu memahami bahwa pengembangan kompetensi TPACK guru BK adalah investasi jangka panjang dalam kualitas layanan sekolah. Dukungan infrastruktur teknologi, pemberian waktu untuk pengembangan profesional, dan penghargaan terhadap inovasi layanan BK berbasis teknologi adalah hal-hal konkret yang dapat dilakukan sekolah. Ketiga bagi perguruan tinggi LPTK, program studi BK perlu meninjau ulang kurikulum agar lebih sistematis mengintegrasikan pengembangan TPACK sejak mahasiswa masih dalam pendidikan pra- jabatan. Micro-teaching berbasis TPACK, praktik teknologi dalam layanan BK, dan mata kuliah pedagogi digital yang spesifik untuk konteks BK adalah hal-hal yang perlu diperkuat. Terakhir, program pengabdian ini perlu mendapat tindak lanjut berupa pendampingan jangka menengah. Evaluasi satu bulan pasca kegiatan yang sudah direncanakan perlu benar-benar dilaksanakan dan hasilnya dijadikan dasar untuk merancang program

lanjutan. Hanya dengan pendekatan pengembangan yang berkesinambungan inilah transformasi kompetensi TPACK konselor sekolah dapat benar-benar terwujud.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang yang telah mendanai Program kemitraan masyarakat dan penelitian ini, dengan no kontrak 2117/UN35.15/PM/2024.

Referensi

- Afdal, A. A. (2019). Increasing life satisfaction of domestic violence victims through the role of supporting group therapy on social media. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 8(8), 1-14.
- Afdal, A. Z. (2024). *Counselor Technological Pedagogical Content Knowledge Competences: Analysis at the Counselor Level in West Sumatera*. Universitas Negeri Padang: Departemen Bimbingan dan Konseling.
- Anggraini, A. H. (2025). Integrasi Teknologi dalam Evaluasi Pembelajaran: Model Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) untuk Mengembangkan Kompetensi Digital. *Pedagogik Journal of Islamic Elementary School*, 8(2), 722-735.
- Csikos, C. &. (2020). Teachers' pedagogical content knowledge in teaching word problem solving strategies. *ZDM*, 52(1), 165-178.
- Hussin, A. A. (2018). Education 4.0 made simple: Ideas for teaching. *International Journal of Education and Literacy Studies*, 6(3), 92-98.
- Jacob, F. I. (2020). Teachers' pedagogical content knowledge and students' academic achievement: A theoretical overview. *Journal of Global Research in Education and Social Science*, 14(2), 14-44.
- Koehler, M. J. (2013). What is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)? . *Journal of Education*, 193(3), 13-19.
- Lai, T. &.-F. (2018). An investigation of the relationship of beliefs, values and technological pedagogical content knowledge among teachers. *Technology, Pedagogy and Education*, 27(4), 445-458.
- Mishra, P. &. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017-1054.
- Niess, M. L. (2011). Investigating TPACK: Knowledge growth in teaching with technology. *Journal of Educational Computing Research*, 44(3), 299-317.
- Ozudogru, M. &. (2019). Technological pedagogical content knowledge of mathematics teachers and the effect of demographic variables. *Contemporary Educational Technology*, 10(1), 1-24.
- Rimayati, E. (2023). *Cybercounseling: Inovasi layanan bimbingan dan konseling di era digital*. . Jakarta: Asadel Liamsindo Teknologi.
- Rosenkranzer, F. H. (2017). Student teachers' pedagogical content knowledge for teaching systems thinking. *International Journal of Science Education*, 39(14), 1932-1951.
- Santos, J. M. (2021). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) in action: Application of learning in the classroom by pre-service teachers. *Social Sciences & Humanities Open*, 3(1), 100110.
- Scharmer, C. O. (2018). *The essentials of Theory U: Core principles and applications*. Berrett: Koehler Publishers.
- Schroth, H. (2019). Are you ready for Gen Z in the workplace? . *California Management Review*, 61(3), 5-18.
- Sukmawati, I. A. (2022). Technology Pedagogy Content Knowledge in Early Childhood Education. *Dalam 6th International Conference of Early Childhood Education (ICECE-6 2021)* (pp. 10-12). Padang: Atlantis Press.
- Susanto, N. M. (2020). Standar pelayanan minimal pendidikan perspektif revolusi industri 4.0 di SD Bayan Islamic School. *Andragogi*, 2(3), 1-19.
- Szymkowiak, A. M. (2021). Information technology and Gen Z: The role of teachers, the internet, and technology in the education of young people. *Technology in Society*, 65, 101565.
- Valtonen, T. L. (2020). Fresh perspectives on TPACK: pre-service teachers' own appraisal of their challenging and confident TPACK areas. *Education and Information Technologies*, 25(4), 2823-2842.